

**INOVASI KEBIJAKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
(STUDI PADA KAWASAN EKOWISATA SITUTERATE DESA
SITUTERATE KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG)**

Ahmad Sururi¹

¹Program Studi Administrasi Publik Universitas Serang Raya
Alamat Korespodensi: ahmadbroer@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze how public participation in handling and management of Ecotourism Area and develop innovation model of public participation policy in Management and Development of Ecotourism Area Situterate Cikande Sub-District, Serang District. The research method used is descriptive qualitative with primary data collection techniques in the form of interview, observation and documentation. The results showed that public participation in tourism handling and management in the ecotourism area Situterate Cikande Serang Regency has not been done optimally, the public is still positioned as an object, passive and not yet have a high level of awareness in the management and development of ecotourism areas.

Keyword: Policy Innovation, Public Participation, Tourism

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan Kawasan Ekowisata dan mengembangkan model inovasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Kecamatan Sitondoate Cikande, Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan kepariwisataan di kawasan ekowisata Situterate Cikande Kabupaten Serang belum dilakukan secara optimal, masyarakat masih diposisikan sebagai objek, pasif dan belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Kata Kunci: Inovasi Kebijakan, Partisipasi Publik, Pariwisata

Pendahuluan

Sektor Pariwisata mempunyai kekuatan sinergik dan memiliki keterkaitan yang erat sekali dengan berbagai sektor-sektor pembangunan lainnya. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan berskala kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini terbangun prinsip konektivitas antara berbagai sektor pembangunan dalam suatu wilayah kawasan pariwisata yang memberikan dampak baik secara ekonomis maupun sosial. Oleh sebab itu pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata disuatu wilayah atau daerah harus menjadi fokus perhatian stakeholder pembangunan pariwisata.

Kabupaten Serang sebagai salah satu daerah di Provinsi Banten memiliki beragam destinasi wisata yang memiliki potensi yang sangat besar. Tercatat terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) objek wisata di Kabupaten Serang yang tersebar dalam berbagai destinasi objek wisata seperti 11 (sebelas) objek wisata alam, 2 (dua) objek wisata buatan, 34 (tiga puluh empat) objek wisata bahari/pantai/marina, 8 (delapan) objek wisata tirta, 19 (sembilan belas) objek wisata sejarah, 1 objek wisata suaka alam dan 4 (empat) objek wisata budaya/seni dan kerajinan. (data base kepariwisataan, Disporapar, 2018). Dengan jumlah tersebut, pemerintah Kabupaten Serang optimis sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Serang.

Perkembangan banyaknya wisatawan yang datang langsung ke Kabupaten Serang dapat dilihat dari kunjungan wisatawan yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Wisatawan di Kabupaten Serang

Tahun	Objek wisata	Wisata ziarah	Jumlah
2013	6.583.246	4.816.198	11.399.444
2014	6.107.998	1.805.052	7.913.050
2015	3.488.152	8.084.765	11.572.917

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, tahun 2016

Kecenderungan belum signifikannya perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang disebabkan karena belum adanya kalender wisata yang berfungsi untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke lokasi wisata yang ada di Kabupaten Serang. http://www.radarbanten.co.id/_____pembkab-serang-belum-miliki-kalender-wisata (diakses pada tanggal 02 Oktober 2017) sehingga menyebabkan potensi pariwisata belum dapat berjalan secara optimal. Disisi lain sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam melakukan penataan dan pengelolaan pariwisata belum berjalan dengan baik sehingga kegiatan-kegiatan event wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang belum dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Selain itu terdapat berbagai persoalan terkait dengan masih belum signifikannya tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Serang seperti konsep penataan dan pengelolaan destinasi wisata yang masih mengedepankan ego sektoral, ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam merespon isu dan agenda pariwisata publik, belum tersusunnya agenda kalender wisata dan masih minimnya kreatifitas pengelola destinasi wisata. Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan maka akan menyebabkan potensi pariwisata yang dimiliki tidak akan berkembang dengan baik.

Salah satu potensi wisata di Kabupaten Serang yang cukup menarik untuk dikembangkan melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta adalah kawasan ekowisata Situterate yang terletak di Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Kawasan dengan sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan pedagang pada saat ini menjadi salah satu destinasi kunjungan wisata di Kabupaten Serang. Nama Situterate ini berasal dari banyaknya tanaman teratai yang dahulu memenuhi area situ. Kawasan ekowisata Situterate yang memiliki luas 27 hektar ini sebelumnya adalah danau yang hanya dipenuhi tanaman teratai dan tidak memiliki fungsi sama sekali. Setelah dilakukan penataan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Serang sebagai *leading sector* dan dukungan masyarakat sekitar pada saat ini danau tersebut telah menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Serang dan pada tahun 2015 objek wisata ini telah diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang menjadi kawasan ekonomi wisata Serang Timur.

Berdasarkan data diperoleh bahwa jumlah pengunjung di Kawasan Ekowisata Situterate hingga 2017 diperkirakan sudah mencapai 11.520 pengunjung yang terdiri dari 120 pengunjung setiap minggunya baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Wisatawan dapat menikmati beberapa wahana permainan seperti perahu bebek dan naga yang dapat disewa dengan harga Rp 10.000,-/15 menit selain itu fasilitas lain yang disediakan adalah gazebo dan warung-warung yang tersedia di kawasan ekowisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang berencana menjadikan danau ini sebagai pusat wisata dan pusat ekonomi masyarakat serta memfasilitasi berbagai sarana penunjang. Menurut rencana 13 hektar wilayah dari kawasan tersebut akan dibangun alun-alun sebagai sarana penunjang berbagai kegiatan dalam pengembangan ekowisata. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan tersebut, diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dengan membuka usaha kecil disekitar kawasan ekowisata, membuat wahana permainan, pemanfaatan lahan sebagai tempat parkir dan sebagainya. Mbaiwa (2011) and Zhang (2012) *stated that tourism village development is able to provide many benefits, including (1)enhancing the rural collective economy, (2)beautifying the rural appearance, (3)strengthening the rural civilization construction, (4)increasing the community incomes, (5)changing on community traditional livelihood activities and lifestyles, and (6 reducing the urban-rural gap and building a harmonious society. Certainly, an establishment of village tourism should offer an opportunity for the community to improve their houses and neighborhood. For this reason, activities of tourism village need the participation of the local community.* (Sesotyanyingtyas & Manaf, 2014). Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang atau masyarakat dalam atau di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan atau pengelolaan. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat secara aktif

mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata menjadi penting, dalam hal ini mendorong partisipasi publik menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya masyarakat kawasan pariwisata melalui sebuah model konseptual partisipasi publik.

Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan terkait partisipasi publik dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Situterate seperti belum konsistennya keterlibatan masyarakat dan cenderung masih bersifat parsial, partisipasi hanya dilakukan pada situasi dan kondisi jumlah kunjungan wisatawan sedang meningkat terutama pada saat hari libur nasional. Berbagai permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya keseragaman pemahaman partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan kawasan Ekowisata Situterate antara pemerintah daerah selaku perencana pembangunan dan masyarakat. Selain itu masih terdapat kecenderungan bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan pariwisata sehingga partisipasi publik belum berjalan secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana partisipasi publik dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Ekowisata dan menganalisis pengembangan model inovasi kebijakan partisipasi publik dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

Kerangka Teori

Bahwa inovasi kebijakan menjadi menjadi kata kunci bagi keberlanjutan organisasi sektor publik maupun sektor privat, *policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it* (Walker dalam Tyran & Sausgruber, 2003: 4), *"Innovation policy is increasingly conceived as the shared responsibility of national and subnational governments, yet most countries are struggling with multilevel governance.* Kata inovasi kebijakan didefinisikan secara sederhana yaitu, *innovations are new ideas, or "the process to undertake a change in one or more of many aspects of production, distribution, and consumption of economic goods"* (Beije, 2000 dalam Shavinina, 2003) sehingga sebagai sebuah gagasan atau proses, inovasi kebijakan bersifat multi aspek dan dapat dilihat dalam perspektif kebaruan dan sebagai kebijakan adopsi suatu negara, *policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it.* (Walker, Tyran & Sausgruber, 2003:4). Dan untuk memperkuat pendapat bahwa inovasi kebijakan mengandung unsur kebaruan, disebutkan bahwa pertama, *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru; kedua, *Innovations in the policy-making*

process (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan; ketiga *Policy to foster innovation and its diffusion*. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor. (Albury, 2003 dalam Sururi, 2017 : 98)

Inovasi kebijakan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan seperti pendidikan, sosial dan keuangan. *Innovation policies are central to growth agendas in most countries, but have figured much less prominently in strategies to promote social inclusion. Other policy areas such as education, social and about market policies, competition and tax policies have traditionally played a stronger role in fostering more inclusive societies*, (Planes-Satorra, S. and C. Paunov (2017). Selanjutnya dikemukakan bahwa *most innovation policies focus on : providing appropriate incentives to promote innovation activities, in both the private and public sectors (e.g. tax incentives for R&D, grants for R&D, venture capital), 1).investing in public R&D infrastructure (e.g. public research laboratories); 2).removing barriers to innovation and entrepreneurship (e.g. anti-competitive practices preventing market entry, overly strict conditions for start-ups to access credit); 3).improving the framework conditions for innovation (e.g. science and technology education, mechanisms to facilitate interaction among participants in the innovation system, measures to promote the mobility of public researchers)*, (Planes-Satorra, S. and C. Paunov 2017)

Kemudian kebijakan inovasi dapat dilihat dalam berbagai kategori, *the use of new management practices and organization structures, the development and retention of skilled personnel, new ways of securing financial resources, and new ways of managing the interface with government and other external agencies are also forms of innovation* (Mehta and Joshi, 2002). Contoh dari kebaruan praktek-praktek dalam manajemen dan struktur organisasi misalnya melakukan restrukturisasi organisasi dengan tujuan efisiensi, mengembangkan keterampilan individu dengan mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pengamananan sumber keuangan melalui investasi organisasi dan praktek inovasi dengan kerjasama antara pemerintah dan lembaga eksternal lainnya. Selanjutnya terdapat beberapa klasifikasi perilaku inovasi yang berdampak pada tujuan partisipasi yang terdiri dari: *inovator* (pendiri), *early adopter* (pelopor), *early majority* (penganut dini), *late majority* (penganut lambat) dan *laggards* (kelompok yang tidak bersedia berubah), (Rogers, 1971 dalam Mardikanto, 2014). Menurut Rogers, perilaku inovatif penting dipahami karena meskipun kelompok pendiri dan pelopor cepat mengadopsi inovasi akan tetapi dalam prosesnya tidak bisa dijadikan panutan karena kondisi sosial ekonomi dan keberanian mengambil resiko berada jauh di atas rata-rata sebagian besar kelompok masyarakat yang lain. Oleh sebab itu pusat perhatian difokuskan kepada kelompok penganut dini dan kelompok penganut lambat dengan

menempatkan kelompok ketiga sebagai panutan karena relatif memiliki status sosial ekonomi dan keberanian mengambil resiko yang tidak banyak berbeda dengan sebagian besar anggota masyarakatnya.

Konsep partisipasi publik saat ini sudah menjadi paradigma dalam pengelolaan pembangunan berbagai sektor. Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dan interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewewenang, tanggungjawab dan manfaat. (Verhagen, 1979 dalam Mardikanto, 2014) dari seluruh masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dan tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan (Mardikanto, 2014:197) dalam hal ini adalah masyarakat sekitar objek wisata. Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam proses pembangunan khususnya dalam pengembangan kawasan ekowisata, masyarakat diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka, mereka memahami tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya. (Rahardjo Adisasmita, 2013 : 80). *Public participation in tourism can be viewed from at least two perspectives: in the decision-making process and in the benefits of tourism development (Figure 1) (McIntosh and Goeldner 1986; Wall 1995). Participation in the former generally refers to empowering local residents to determine their own goals for development, and consulting with locals to determine their hopes and concerns for tourism.* (Timothy, 1999). Publik diposisikan sebagai subjek pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam pembangunan pariwisata tersebut. Dengan demikian, sebagai sektor yang memiliki dampak multisektoral, sektor pariwisata perlu mendapatkan pengelolaan dan pengembangan dengan melibatkan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak terutama masyarakat sekitar kawasan pariwisata.

Selanjutnya dikatakan ada beberapa alasan utama, yaitu : *Pertama* adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan masyarakat. *Kedua* partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. *Ketiga* partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. *Keempat* partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi khas daerah. Dilihat dari tujuan tersebut maka itu sebabnya mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses pembangunan, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, tentang permasalahan dan kebutuhan, baik itu dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. (Rahardjo Adisasmita, 2013 : 82)

Berbagai penelitian tentang konsep ekowisata sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian tentang konsep ekowisata berbasis modal

sosial masyarakat desa, dimana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa modal jaringan, kepercayaan, norma dan partisipasi masyarakat, merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengembangkan ekowisata. (Purwodadi, Pasuruan, & Baksh, 2013). Meskipun demikian konsep tentang bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat secara holistik dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata perlu terus dioptimalkan melalui berbagai inovasi partisipatif yang mampu memberikan kemudahan bagi publik sehingga modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat memiliki dampak dan manfaat untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa potensi ekowisata berbasis masyarakat dengan melihat 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi dan politik. (Tanaya & Rudiarto, 2014) Secara substansi konsep tiga dimensi tersebut merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan potensi ekowisata yang harus diperhatikan oleh stakeholders kebijakan pariwisata. Dalam hal ini konsep 3 dimensi tersebut perlu dibarengi dengan inovasi partisipasi publik dalam mendukung potensi ekowisata berbasis masyarakat dapat berjalan secara optimal. Menurut Nugroho (2016 :15), ekowisata adalah suatu kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan sebagai suatu sektor atau usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya pariwisata sektor publik seperti kawasan ekowisata secara demokratis dapat dicapai, terutama jika tiga syarat dipenuhi (bdk. Elliot, 1997 dalam Damanik, 2005), yaitu sebagai berikut : pertama, peran sebagai stakeholder didefinisikan secara jelas dan dijalankan secara konsisten, yakni siapa melakukan apa dan dengan konsekuensi bagaimana. kedua, ada aturan main yang jelas, mengikat dan adil bahwa pemanfaatan sumberdaya pariwisata harus ditinjau setiap saat apabila hasilnya merugikan salah satu pihak. Ketiga, sumberdaya pariwisata dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu pada tataran implementatif, diperlukan sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan dengan dukungan dari pihak swasta, dalam hal ini pemerintah Daerah harus mempunyai *design* kebijakan pengembangan pariwisata dengan melibatkan pihak swasta untuk melakukan pendekatan inisiatif kepada masyarakat agar mau berpartisipasi, dengan pendekatan konsep dan membangun pemahaman bahwa masyarakat layak dan mampu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata situterate. Pemerintah dituntut untuk merumuskan suatu desain kebijakan pengembangan pariwisata yang membuka peluang luas bagi masyarakat tidak saja untuk ikut merencanakan kegiatan dan sasaran-sasaran pembangunan pariwisata akan tetapi juga turut serta menikmati hasil yang diperoleh secara adil. (Damanik, 2005). Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka akan menumbuhkan ruang partisipasi bagi

publik secara aktif dikarenakan mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengembangan kawasan ekowisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data terbagi menjadi sumber data primer melalui wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi seperti buku, jurnal dan artikel surat kabar. Sedangkan teknik pemilihan key informan dilakukan melalui *purposive sampling*. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1984) melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi publik dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penanganan dan pengelolaan pariwisata di kawasan ekowisata Situterate Cikande Kabupaten Serang belum dilakukan secara optimal, publik masih diposisikan sebagai objek, bersifat pasif dan belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usaha-usaha berskala kecil karena terlalu dominannya pihak pemerintahan desa dan Kabupaten dalam pengelolaan kawasan ekowisata tersebut. Fasilitas yang ada seperti gazebo, perahu bebek dan area parkir sebagian besar dikelola oleh pihak Pemerintah Desa dan belum memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat.

Kemudian dalam menganalisis bagaimana partisipasi publik dalam penanganan dan pengelolaan kawasan ekowisata Situterate Cikande Kabupaten Serang dan bagaimana tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan oleh tiga unsur pokok, (Slamet dalam Mardikanto 2014 : 207) yaitu, Pertama adanya kesempatan yang diberikan masyarakat untuk berpartisipasi; berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi masih sangat rendah, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa maupun pengelola dalam kegiatan musyawarah desa belum dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Kedua, adanya kemauan masarakat untuk berpatisipasi; partisipasi yang diharapkan dalam tahap ini adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan dan pengembangan objek wisata, partisipasi masyarakat dianggap penting, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, tentang permasalahan dan kebutuhan baik itu dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi termasuk dalam hal ini proses pembangunan atau pengembangan kawasan ekowisata, partisipasi

masyarakat dapat diwujudkan mulai dari perencanaan, pembangunan, dan kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan. (Quebec dalam Nugroho, 2015:15). Ketiga, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam tahap ini adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan yang nantinya bertujuan untuk memperbaiki mutu hidupnya, partisipasi merupakan perwujudan kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka, (Mardikanto, 2015:197) Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

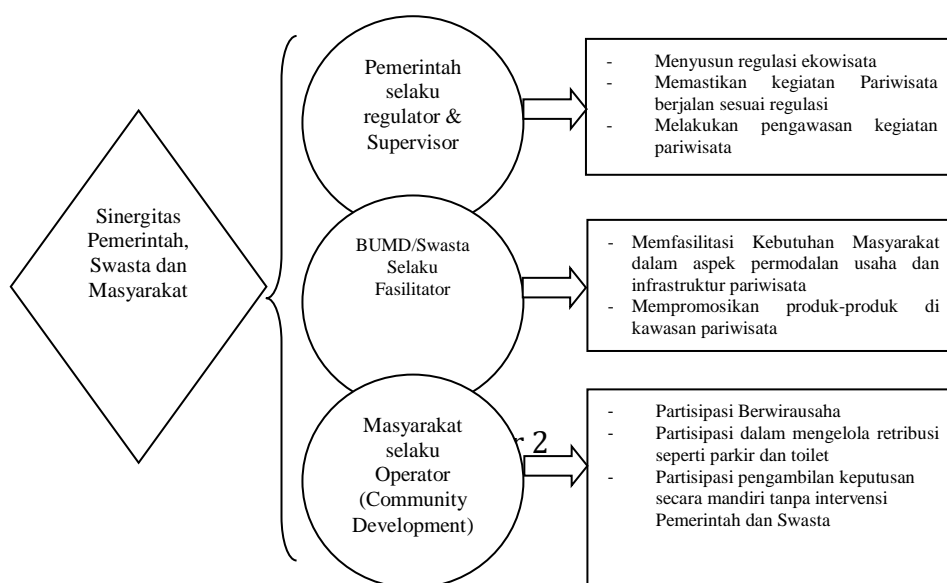
Pengelolaan dan pengembangan potensi kawasan ekowisata dengan melibatkan partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan publik adalah yang paling memahami karakteristik dan potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan dan menjadi nilai jual pariwisata, selain itu mendorong partisipasi publik sebagai aktor utama kawasan ekowisata akan memiliki *sense of belonging* yang tinggi. Dapat dikemukakan bahwa tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan publik diantaranya yaitu, 1).Memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata, 2).Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata, 3).Memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. (Dermatoto (2013:100).

Model inovasi kebijakan partisipasi publik dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

Pengembangan model partisipasi publik berbasis kebijakan publik menjadi penting untuk terciptanya sebuah proses interaksi antara berbagai *stakeholder* pembangunan pariwisata. Oleh sebab itu diperlukan inovasi kebijakan yang dilakukan melalui berbagai upaya-upaya yang berdimensi kebaruan dan kebermanfaatannya sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan (Sururi, 2016 : 6).

Dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata Situterate Cikande Kabupaten Serang, peneliti mengembangkan model inovasi kebijakan melalui sinergitas antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Diperlukan batas-batas kewenangan dan intervensi yang jelas antara pemerintah selaku regulator dan supervisor, swasta selaku fasilitator dan masyarakat/publik selaku operator. Pertama, Pemerintah selaku regulator dalam hal ini adalah menyusun regulasi atau aturan-aturan yang jelas terkait

bagaimana mekanisme penanganan dan pengembangan kawasan ekowisata dengan memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi dan swasta sebagai fasilitator, selain menjalankan fungsi regulator, Pemerintah menjalankan fungsi pengawasan mekanisme pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata; Kedua pihak swasta mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam aspek permodalan usaha dan infrastruktur pariwisata dan dilain pihak, swasta diberikan kesempatan untuk mempromosikan produk-produknya di kawasan pariwisata sehingga dalam ini terjadi prinsip konektivitas dan *simbiosis mutualisme*; ketiga public/masyarakat diposisikan sebagai operator dengan berbasis *community development*, dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan usaha di kawasan ekowisata, menjalankan pengelolaan retribusi seperti parkir dan toilet, dan berpartisipasi pengambilan keputusan secara mandiri tanpa intervensi Pemerintah dan Swasta.



Pengembangan Model Inovasi Kebijakan Penanganan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata
 Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Fokus dan pendekatan dengan mengembangkan sumber daya lokal, kemandirian masyarakat dalam berpartisipasi dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata *this differs from previous approaches to regional development through its focus on local strengths and advantages, and is aimed at enabling more autonomous and less dependency-based sustainable regional development* (Scho llmann & Dalziel (2002, p. 7, Shone & Memon, 2008), Oleh sebab itu mendorong masyarakat untuk

memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kawasan eko wisata perlu terus dilakukan, oleh karena *Eco Tourism must do more than create a series of activities to attract visitors, offering them an opportunity to interact with nature in such a way as to make it possible to preserve or enhance the special qualities of the site and its flora and fauna, while allowing local inhabitants and future visitors to continue to enjoy these qualities.* (Barkin, 2000), artinya, Ekowisata harus dilakukan lebih dari sekadar membuat serangkaian kegiatan untuk menarik pengunjung akan tetapi juga menawarkan kesempatan kepada mereka untuk berinteraksi dengan alam sehingga memungkinkan untuk melestarikan flora dan fauna bagi penduduk local maupun pengunjung, selain itu peran penting Pemerintah dan swasta selaku regulator dan fasilitator memegang peranan penting.

Membangun partisipasi publik dalam kawasan eko wisata harus memperhatikan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu alternatif penanganan dan pengembangan kawasan ekowisata adalah pendekatan manajemen pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Dengan pendekatan berbasis komunitas, publik melibatkan diri dalam sebuah kelompok yang dinamis dan berupaya mengembangkan potensi yang dimilikinya. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan eko wisata adalah sinergitas dengan menekankan pada model inovasi kebijakan partisipasi publik dengan kejelasan batas-batas kewenangan dan intervensi antara ketiga stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan publik. Prinsip-prinsip konektivitas dan simbiosis mutualisme menjadi pendekatan utama agar ketiga stakeholder tersebut dapat bersinergi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Partisipasi publik merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan pariwisata, hal tersebut didukung dengan konsep dan mekanisme partisipasi publik yang mampu memberikan daya dukung dan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata Situterate Cikande Kabupaten Serang, terdapat 3 (tiga) model pengembangan inovasi kebijakan yang dibangun melalui sinergitas antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dengan pendekatan dan pengembangan sumber daya lokal dan kemandirian masyarakat sebagai tujuan utama dalam berpartisipasi maka tingkat keberhasilan partisipasi publik dapat tercapai. Kemudian membangun partisipasi publik dalam kawasan eko wisata harus memperhatikan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dan pentingnya mengembangkan pendekatan manajemen pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif Tipologi Strategi dan Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Barkin, David, 2000. "Eco Tourism : A Tool For Sustainable Development", *J Ilm Pariwisata*, Volume 4 Nomor 3, Mei 2000
- Damanik, J. 2005. Kebijakan dan Pariwisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8 (September, 2004), 331-352
- Demartoto, Argyo.2013. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam pendidikan*. UNS Press: Yogyakarta.
- Mardikanto, Theresia A., dkk., 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.
- Nugroho, Iwan. 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Planes-Satorra, S. and C. Paunov (2017), "Inclusive innovation policies: Lessons from international case studies", *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2017/02, OECD Publishing, Paris
- Shone C Michael & Memon P Ali, 2008. Tourism, Public Policy and Regional Development: A Turn from Neo-liberalism to the New Regionalism, *Local Economy*, Volume 23 Nomor 4 , November 2008, 290-304
- Sururi, Ahmad, 2017. "Inovasi Model Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten", *Jurnal Scientium Dewan Riset Daerah Banten*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2017, 95-115
- _____. 2016. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)", *Jurnal Sawala Prodi Administrasi Negara Unsera*, 4 (3), 1-14
- Timothy, J Dallen, 2000. "Building Community Awareness of Tourism in a Developing Country Destination", *Tourism Recreation Research* Volume. 25 (2), 2000: 111-116
- Tanaya,D.R, & Rudiarto, I. 2014. *Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang*, 3 (1), 71-81
- Tyran. 2003. *Diffusion of Policy Innovation*. Universität St.Gallen.